

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang bersifat kompleks dan multidimensional yang hingga saat ini masih menjadi isu global. Tidak hanya terjadi di negara berkembang, kemiskinan juga masih menjadi tantangan serius di berbagai negara maju. Secara konseptual, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta partisipasi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kemiskinan sering kali dikaitkan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

Dalam konteks global, berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia (*World Bank*) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan. Salah satu strategi yang banyak diterapkan adalah melalui program perlindungan sosial yang terintegrasi, termasuk bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*). Program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu, seperti kewajiban menyekolahkan anak dan memanfaatkan fasilitas kesehatan. Pendekatan ini dianggap efektif karena tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya

manusia dalam jangka panjang, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi (*intergenerational poverty*).

Indonesia sebagai negara berkembang juga menghadapi permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks. Meskipun dalam beberapa dekade terakhir angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, namun jumlah penduduk miskin masih relatif besar dan tersebar di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Selain itu, komitmen Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan juga tercermin dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan pertama yaitu menghapus kemiskinan dalam segala bentuk.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai program perlindungan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Salah satu program unggulan yang menjadi instrumen utama dalam penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2007 dan hingga saat ini terus mengalami pengembangan baik dari segi cakupan maupun mekanisme pelaksanaannya.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses

terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaannya, PKH tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga disertai dengan kewajiban bagi penerima manfaat untuk memenuhi komitmen tertentu, seperti memastikan anak bersekolah secara rutin, melakukan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan balita, serta memberikan perhatian terhadap kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Secara regulatif, pelaksanaan PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa PKH tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup serta mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, PKH memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi jangka pendek dalam bentuk bantuan sosial dan dimensi jangka panjang dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Secara nasional, Pergub Kalsel No. 23 Tahun 2021 mengatur berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, mulai dari sasaran penerima layanan, bentuk pelayanan sosial, sumber pendanaan, hingga mekanisme pengawasan. Sasaran utama dari kebijakan ini adalah masyarakat yang mengalami masalah sosial, seperti keluarga miskin, anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, korban bencana, serta kelompok rentan lainnya. berbagai hasil penelitian dan data empiris menunjukkan bahwa PKH telah memberikan kontribusi positif dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan secara bertahap,

yang salah satunya didukung oleh keberadaan program bantuan sosial seperti PKH. Selain itu, program PKH juga terbukti mampu meningkatkan partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga miskin serta meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan.

Pada tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin sebagai upaya menjamin hak masyarakat dalam memperoleh akses keadilan secara merata. program PKH menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah turut mendukung pelaksanaan program ini melalui berbagai kebijakan yang sejalan dengan program nasional. Namun demikian, dalam implementasinya di lapangan, masih ditemukan berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas program. Beberapa hasil penelitian dan laporan menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di daerah masih menghadapi persoalan terkait validitas data penerima, kurangnya koordinasi antar pelaksana, serta minimnya upaya pemberdayaan yang berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat.

Kondisi tersebut juga tercermin di Kecamatan Babirik, yang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan jumlah penerima manfaat PKH yang cukup signifikan. Secara umum, masyarakat di wilayah ini masih didominasi oleh kelompok ekonomi menengah ke bawah dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian, perikanan, dan pekerjaan informal. Keterbatasan pendapatan serta akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas menyebabkan masyarakat masih bergantung pada bantuan sosial sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan hidup.

Secara lebih khusus, di Desa Sungai Papuyu Kecamatan Babirik, pelaksanaan Program Keluarga Harapan menunjukkan adanya berbagai fenomena permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pertama adalah kurangnya sosialisasi program, yang mengakibatkan masih banyak keluarga penerima manfaat belum memahami secara menyeluruh tujuan, mekanisme, serta kewajiban dalam program PKH. Sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa PKH merupakan bantuan uang tunai untuk kebutuhan pendidikan, tanpa memahami bahwa program ini juga menekankan pada peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan bantuan sesuai dengan tujuan program.

Permasalahan kedua adalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan PKH. Dalam praktiknya, masih ditemukan adanya keluarga yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat tetapi belum terdaftar, sementara di sisi lain terdapat keluarga yang secara ekonomi sudah tergolong mampu namun masih menerima bantuan. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam proses pendataan dan validasi data penerima manfaat. Ketidaktepatan sasaran ini tidak hanya mengurangi efektivitas program, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Permasalahan ketiga adalah belum terciptanya kemandirian ekonomi bagi keluarga penerima manfaat. Salah satu tujuan utama PKH adalah mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas ekonomi keluarga agar dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Namun, dalam

kenyataannya, sebagian keluarga penerima manfaat di Desa Sungai Papuyu masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap bantuan PKH. Bantuan yang diterima cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, tanpa diimbangi dengan upaya peningkatan pendapatan atau pemberdayaan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa program PKH belum sepenuhnya berhasil dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun Program Keluarga Harapan memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaannya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas program. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji sejauh mana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Papuyu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi pada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas, maka akan terjadi peningkatan efektivitas walaupun belum tentu efisien.

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan program. Yang akan peneliti teliti ialah Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Papuyu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Papuyu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang masih terdapat permasalahan terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Observasi peneliti, ditemukan permasalahan yang ada yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi program sehingga kurang pahamnya keluarga penerima manfaat terhadap Program Keluarga Harapan :

Kurangnya sosialisasi program menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat pemahaman keluarga penerima manfaat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH). Sosialisasi yang belum dilakukan secara menyeluruh menyebabkan sebagian masyarakat tidak memahami tujuan, mekanisme, serta hak dan kewajiban dalam program tersebut. Akibatnya, terdapat anggapan bahwa PKH hanya berfokus pada bantuan pendidikan, padahal program ini juga mencakup aspek kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kondisi ini membuat pemanfaatan program menjadi kurang optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Sumber: Aparat Desa dan Masyarakat penerima pkh desa sungai papuyu)

2. Permasalahan ketidaktepatan sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) :

Permasalahan yang seharusnya dapat sebagai penerima bantuan merupakan salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan

(PKH), termasuk di tingkat kecamatan seperti Kecamatan Babirik. Sebagai program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan khusus bagi keluarga miskin dan rentan, ketepatan dalam menentukan penerima manfaat menjadi kunci keberhasilan program. Apabila penyaluran bantuan tidak tepat sasaran, maka tujuan utama PKH untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai secara optimal.

(Sumber: *Penerima pkh desa sungai papuyu 2025*)

3. Program Keluarga Harapan belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi Keluarga Penerima Manfaat :

Program Keluarga Harapan pada dasarnya dirancang tidak hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga untuk mendorong terciptanya kemandirian ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat keluarga penerima manfaat yang bergantung pada bantuan yang diberikan. Bantuan yang diterima belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan jangka panjang program dalam menciptakan kemandirian ekonomi belum tercapai secara optimal, sehingga diperlukan upaya tambahan seperti pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. (Sumber: *Observasi Penerima pkh desa sungai papuyu 2025*).

Novelty penelitian Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sungai Papuyu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada Menggunakan lima indikator efektivitas menurut Edy Sutrisno, yaitu

pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Urgensi penelitian ini adalah memberikan informasi empiris untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas PKH, khususnya dalam sosialisasi, pembaruan data, koordinasi, dan pendampingan, sehingga bantuan tidak hanya mengurangi beban masyarakat, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Research Gap Penelitian ini terletak pada belum adanya kajian efektivitas PKH di Desa Sungai Papuyu menggunakan lima indikator Edy Sutrisno. Penelitian ini juga mengkaji rendahnya pemahaman masyarakat, ketidaktepatan sasaran, belum tercapainya kemandirian ekonomi, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PKH.

Berdasarkan *Novelty*, *Urgensi* dan *Research Gap* sebelumnya maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Program Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sungai Papuyu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B . Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut teori Edy Sutrisno (2018:125-126) yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan

5. Perubahan Nyata

C. Rumusan Masalah

Sebagai usaha untuk melakukan penelitian yang lebih terarah serta agar lebih mudah memperoleh jawaban atau permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis berpijak pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Papuyu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Keefektifan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Papuyu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara?

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di temukan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sungai Papuyu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat keefektifan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sungai Papuyu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penilitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kegunaan untuk pengembangan Ilmu Administrasi Publik dan Kebijakan Publik. Penelitian ini Juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian

berikutnya yang sejenis dengan Efektivitas Program Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sungai Papuyu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pelaksanaan yang berkaitan dengan Efektivitas Program Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sungai Papuyu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

